



RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PANGKALPINANG
2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru. Program dan kegiatan yang sedang berjalan yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra PD. Kegiatan alternatif atau baru yaitu yaitu program dan kegiatan PD, lintas PD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kegiatan alternatif atau baru memiliki kriteria :
 - a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - b. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra PD;
 - c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 - d. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra PD.
2. Lokasi kegiatan merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama desa/kelurahan, kecamatan.
3. Kelompok sasaran memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan. Indikator kinerja terdiri dari :

- a. indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program;
 - b. indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
4. Prakiraan maju memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Rancangan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) disusun:

- a. Mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD/Renja PD.

- b. Mengacu pada Renstra PD.

Renstra PD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra PD.

- c. Mengacu hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

- d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

- e. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja PD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3888);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 12 Seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 adalah tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

Tujuan dilaksanakan penyusunan Renja PD adalah tersusunya Renja PD yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renja Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan dan Capaian Renja PD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara PD provinsi dengan PD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misal :
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian SDGs,

- c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian SPM,
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f. Pengembangan daerah terisolir,
 - g. dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
- 1) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - 2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - 3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan dan Capaian Renja PD Tahun 2023

Rumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Renja Tahun 2023 disesuaikan dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Renja tersebut juga dirumuskan untuk mendukung pencapaian kinerja Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah program dan kegiatan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 terdiri atas 15 (lima belas) Program dengan 31 (tiga puluh satu) Kegiatan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2023 melaksanakan 15 (lima belas) program dengan 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Kesembilan program kegiatan tersebut adalah :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, 2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, 4. Program Keanekaragaman Hayati (KEHATI), 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), 7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, 8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, 9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, 10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, 11. Program Pengelolaan

Persampahan, 12. Program Pengelolaan Hutan, 13. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, 14. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan, 15. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 8 (delapan) kegiatan, terdiri dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada program Perencanaan Lingkungan Hidup melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi.

Pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pada Program Keanekaragaman Hayati (KEHATI) melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi.

Pada Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Pada program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pada Program Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan

Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.

Pada program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi.

Pada Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat melaksanakan 1(satu) kegiatan, yaitu kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi.

Pada program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi.

Pada Program Pengelolaan Persampahan melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional.

Pada program Pengelolaan Hutan melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan, terdiri dari kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi, kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di luar Kawasan Hutan Negara, kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil hutan Bukan Kayu (HHBK), kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/tahun, dan kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan.

Pada program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES (*Convension On International Trade In Endangered Species*) untuk Kewenangan Daerah Provinsi, dan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Pada progam Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di BidangKehutanan.

Pada program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 sesuai dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Target dan realisasi (kinerja dan keuangan) yang terdapat dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 hampir semuanya mengacu kepada Renstra Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan, sebanyak di 15 program dengan 31 kegiatan.
2. Realisasi program/kegiatan yang menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal, sebanyak di 12 program dengan 28 kegiatan.
3. Realisasi program/kegiatan yang menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian, sebanyak di 8 program dengan 20 kegiatan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :
 - 1) Proses administrasi pembayaran terlambat.
 - 2) Kondisi cuaca/iklim yang mempengaruhi pelaksanaan penanaman,
 - 3) Ketersediaan dana tepat waktu,
 - 4) Terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target adalah :
 - 1) konsisten dalam perencanaan untuk penentuan kegiatan dan penganggaran,
 - 2) pengumpulan data/keterangan yang valid, dan
 - 3) menentukan kegiatan dari program yang realistis.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana ditampilkan pada lampiran Tabel 2.1.

Xxxxxxx

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD mengacu pada IKK, IKU serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangannya berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengampu Urusan Lingkungan Hidup yang

merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Kehutanan yang merupakan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Sejak muncul UU nomor 23 tahun 2014
 PP nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah
 TC.30 halaman 404 lampiran 86
 Target dan realisasi
 Target di renstra
 IKU

Pengukuran capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan Renstra Tahun 2023-2026 dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) oleh Kementerian Dalam Negeri :

1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi

Konsep/Definisi	:	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi
Rumus	:	IKLH Prov = (IKA 30%) + (IKU 30%) + (ITH 40 %)
		IKA = Indeks Kualitas Air
		IKU = Indeks Kualitas Udara
		IKL = Indeks Kualitas Lahan
		IKAL = Indeks Kualitas Air Laut
Keterangan	:	IKLH Prov = 71,64 IKA = 57,51 IKU = 90,15 IKL = 40,09 IKAL=82,57

2. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Rumus	:	<i>Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi</i> <i>Usaha dan atau</i>

		18
		$\times 100\% = 18,95\%$
		95
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan • Yang dimaksud dengan izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia • Dibuktikan dengan dokumen peringkat ketaatan hasil pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup tahun anggaran 2023

3. Peningkatan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial

$$\frac{\text{Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberikan akses legal}}{\text{Jumlah Total Usulan KTH yang Teregistrasi}} \times 100\% =$$

$$= \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis

$$\frac{\text{Lahan Kritis di Provinsi yang direhabilitasi (Ha)}}{\text{Luas Lahan Kritis di Provinsi}} \times 100\% =$$

$$= \frac{5.619,91}{167.104} \times 100\% = 3,36$$

Catatan :

1. Lahan Kritis adalah lahan yang tidak produktif meskipun dikelola produktifitas lahan sangat rendah bahkan dapat terjadi hasil produksi yang diterima jauh lebih sedikit dari biaya produksinya. Lahan kritis bersifat tandus, gundul dan tidak dapat digunakan untuk usaha pertanian karena tingkat kesuburan rendah. (Pedoman Penyusunan LPPD 2021, Kementerian Dalam Negeri).
2. Luas Lahan Kritis Tahun 2022 berdasarkan rewiw BPDAS Tahun 2022 seluas ± 167.104 Hektar

5. Kerusakan Kawasan Hutan

$$\frac{\text{Jumlah Hutan yang Rusak}}{\text{Jumlah Hutan Keseluruhan}} \times 100\% = \text{Persentase kerusakan hutan}$$

$$= \frac{15.365,10}{652.641,52} \times 100\% = 2,354\%$$

Catatan:

Kerusakan hutan disebabkan oleh kebakaran hutan, penebangan hutan secara liar, pembabatan hutan dengan sengaja (Pedoman Penyusunan LPPD 2021, Kementerian Dalam Negeri).

Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh Kementerian PAN dan RB :

1. Persentase pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) per tahun, Formulasi Perhitungan : (Nilai IKLH yang diperoleh) / (target nilai IKLH) x 100%.
2. Luas hutan yang dikelola masyarakat dan perizinan berusaha lainnya, Formulasi Perhitungan : (Jumlah luas pemanfaatan hutan dan luas perhutanan sosial di hutan lindung dan hutan produksi) / (Luas Kawasan hutan lindung dan hutan produksi) x 100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Salah satu masalah yang menonjol di sektor kehutanan adalah masih tingginya luas lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tingginya lahan kritis ini disebabkan *illegal logging* (pembalakan liar) dan *illegal minning* (pertambangan liar) yang terjadi dalam kawasan hutan.

Merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang harus diselesaikan, agar dapat meningkatkan tutupan kawasan hutan sehingga akan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya hutan. Tolak ukur yang dapat dilihat dari keberhasilan peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya hutan adalah:

1. Pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung melalui operasional UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan perhutanan sosial untuk meningkatkan PNBPN dan PAD;
2. Peningkatan upaya reboisasi, rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi lahan bekas tambang;
3. Pelaksanaan perlindungan, pengamanan hutan dan konservasi sumberdaya alam sebagai upaya penurunan kerusakan hutan serta pengelolaan jasa lingkungan dan wisata alam yang belum optimal.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan ruang gerak yang luas bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi, tantangan tersebut adalah :

1. Penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Hutan melalui pembentukan 8 Kesatuan Pengelolaan Hutan yang beroperasi Kesatuan Pengelolaan Hutan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Belum optimalnya pengelolaan persampahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui Perhutanan Sosial program Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Desa (HD) yang masih belum optimal;
5. Koordinasi dengan berbagai stakeholder yang belum berjalan dengan baik;
6. Belum terfokusnya perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka awal pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang didapat yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat, stakeholder dan pemerintah sendiri. Rancangan awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD.

Rancangan awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap PD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap PD dalam menyiapkan rancangan Renja PD.

Review rancangan awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan dengan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan tahun 2024. Proses perbandingan ini dilakukan agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki informasi terhadap perencanaan yang telah dilakukan dan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.

2.6.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

Rencana Program Prioritas

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut :

A. Program yang dilaksanakan setiap OPD :

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan;
2. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Peningkatan Disiplin Aparatur;
5. Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
8. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

C. Urusan Pilihan

Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 untuk urusan pilihan adalah sebagai berikut :

4. Urusan Kehutanan

- a. Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA dan Ekosistem
- b. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan
- c. Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
- d. Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat

2.6.2 Pagu Indikatif

Pagu Indikatif merupakan batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing OPD untuk merencanakan program/kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penentuan pagu indikatif tidak lagi menganut “*money follow function*” akan tetapi berasaskan “*money follow priority programme*”.

Pagu indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 pada Ranwal RKPD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp20.974.949.000,-.

Tabel. II.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Urusan	Sumber Dana	PAGU TAHUN 2025	
					PI 2025 DINAS + UPTD	
					Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7
						50.599.000.576,86
Unit	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					50.710.940.576,86
Tujuan	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi					
Sasaran	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan					
Arah Kebijakan	Peningkatan Pelayan Internal Perangkat Daerah					41.729.624.077
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS DAN UPT				41.729.624.077
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS LHK				36.454.349.077
	DINAS	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DLHK)	LH		83	185.000.000
2 11 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16	185.000.000
2 11 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		PAD	4	140.000.000
2 11 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		PAD	1	-
2 11 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		PAD	1	-

2 11 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		PAD	1	-
2 11 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PAD	7	25.000.000
	DINAS	2. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DLHK)	LH		90	36.269.349.077
2 11 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan				31.988.000.000
2 11 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		PAD	225	31.965.000.000
2 11 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		PAD	1	-
2 11 01 1.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		PAD	1	5.000.000
2 11 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		PAD	1	8.000.000
2 11 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang teradministrasi sesuai dengan peraturan			9	75.000.000
2 11 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		PAD	1	-
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		PAD	8	75.000.000

2 11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian			239	10.000.000
2 11 01 1.05 0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		PAD	225	-
2 11 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		PAD	4	-
2 11 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		PAD	10	10.000.000
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah			128	695.000.000
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		PAD	4	75.000.000
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		PAD	4	100.000.000
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		PAD	2	50.000.000
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		PAD	4	50.000.000
2 11 01 1.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material		PAD	4	80.000.000
2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		PAD	10	40.000.000
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		PAD	100	300.000.000
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan			5	200.000.000
2 11 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		PAD	1	-
2 11 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		PAD	0	-
2 11 01 1.07 0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		PAD	0	-
2 11 01 1.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		PAD	4	200.000.000

2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36	2.301.349.077
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		PAD	12	25.000.000
2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		PAD	12	400.000.000
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		PAD	12	1.876.349.077
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			52	1.000.000.000
2 11 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		PAD	5	50.000.000
2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		PAD	10	250.000.000
2 11 01 1.09 0007	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		PAD	28	200.000.000
2 11 01 1.09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		PAD	0	50.000.000
2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		PAD	4	150.000.000
2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		PAD	5	300.000.000
	UPTD LAB LINGKUNGAN	2. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD Laboratorium Lingkungan)	LH		90	1.765.750.000
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah			22071	749.400.000
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		PAD	22000	25.000.000
2 11 01 1.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material		PAD	60	627.000.000

2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		PAD	1	9.000.000
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		PAD	10	88.400.000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			260	871.350.000
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		PAD	232	44.145.000
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		PAD	28	827.205.000
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			38	145.000.000
2 11 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		PAD	38	145.000.000
	UPTD KPH RM	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Rambat Menduyung)	LH		90	264.500.000
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.000.000
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		PAD	1	1.000.000
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah				85.500.000
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		PAD	4	8.000.000
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		PAD	1	5.000.000
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		PAD	1	30.000.000
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		PAD	2	2.000.000
2 11 01 1.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		PAD	2	4.000.000

2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		PAD	1	1.500.000
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		PAD	1	35.000.000
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3	30.000.000
2 11 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		PAD	3	30.000.000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36	43.000.000
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		PAD	12	1.000.000
2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		PAD	12	37.000.000
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		PAD	12	5.000.000
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			15	105.000.000
2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		PAD	10	80.000.000
2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		PAD	4	15.000.000
2 11 01 1.09 1011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		PAD	1	10.000.000
	UPTD KPH JBA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Jebu Bembang Antan)	LH		90	215.500.000
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang teradministrasi sesuai dengan peraturan				1.000.000

2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PAD	1	1.000.000
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah			65.500.000
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD	4	2.000.000
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD	3	22.000.000
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	PAD	1	2.000.000
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	PAD	2	2.500.000
2 11 01 1.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	PAD	2	1.000.000
2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	PAD	1	1.000.000
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD	1	35.000.000
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3	25.000.000
2 11 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	PAD	3	25.000.000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3	44.000.000
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD	1	1.000.000
2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD	1	37.000.000
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	PAD	1	6.000.000
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		27	80.000.000
2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	PAD	7	70.000.000

2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		PAD	1	-
2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		PAD	19	10.000.000
	UPTD KPH BP	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Bubus Panca)	LH		90	209.525.000
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang teradministrasi sesuai dengan peraturan				1.000.000
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		PAD	1	1.000.000
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah				45.025.000
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		PAD	2	2.000.000
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		PAD	3	7.725.000
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		PAD	1	1.600.000
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		PAD	2	2.500.000
2 11 01 1.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material		PAD	2	5.000.000
2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		PAD	1	1.200.000
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		PAD	76	25.000.000
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3	25.000.000
2 11 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		PAD	3	25.000.000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	43.000.000
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		PAD	1	1.000.000

2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		PAD	1	37.000.000
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		PAD	1	5.000.000
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			9	95.500.000
2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		PAD	3	60.500.000
2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		PAD	1	25.000.000
2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		PAD	5	10.000.000
	UPTD KPH SKW	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Sigambir Kota Waringin)	LH		90	259.500.000
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang teradministrasi sesuai dengan peraturan				1.000.000
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		PAD	2	1.000.000
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah				97.000.000
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		PAD	1	8.000.000
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		PAD	1	25.000.000
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		PAD	1	9.500.000
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		PAD	1	2.000.000
2 11 01 1.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material		PAD	1	20.000.000
2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		PAD	1	2.500.000

2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		PAD	86	30.000.000
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2	25.000.000
2 11 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		PAD	2	25.000.000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			24	27.500.000
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		PAD	10	1.000.000
2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		PAD	12	24.000.000
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		PAD	2	2.500.000
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			22	109.000.000
2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		PAD	6	50.000.000
2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		PAD	1	50.000.000
2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		PAD	15	9.000.000
	UPTD KPH SS	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Sungai Sembulan)	LH		90	241.000.000
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang teradministrasi sesuai dengan peraturan				1.000.000
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		PAD	2	1.000.000

2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah				101.000.000
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		PAD	1	25.000.000
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		PAD	1	3.000.000
2 11 01 1.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		PAD	1	3.000.000
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		PAD	86	40.000.000
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5	25.000.000
2 11 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		PAD	5	25.000.000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14	29.000.000
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		PAD	1	2.000.000
2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		PAD	12	24.000.000
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		PAD	1	3.000.000
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			5	85.000.000
2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		PAD	3	60.000.000

2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		PAD	1	15.000.000
2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		PAD	1	10.000.000
	UPTD KPH MP	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Muntai Palas)	LH		90	271.000.000
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang teradministrasi sesuai dengan peraturan				1.000.000
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		PAD	1	1.000.000
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah				87.500.000
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		PAD	1	2.000.000
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		PAD	1	13.000.000
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		PAD	1	9.500.000
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		PAD	1	5.000.000
2 11 01 1.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		PAD	1	3.000.000
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		PAD	86	45.000.000
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1	25.000.000
2 11 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		PAD	1	25.000.000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14	27.500.000
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		PAD	1	2.500.000

2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		PAD	12	15.000.000
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			5	130.000.000
2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		PAD	3	75.000.000
2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		PAD	1	50.000.000
2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		PAD	1	5.000.000
	UPTD KPH BM	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Belantu Mendanau)	LH		90	1.787.000.000
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang teradministrasi sesuai dengan peraturan				1.000.000
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		PAD	1	1.000.000
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah				129.000.000
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		PAD	1	25.000.000
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		PAD	1	40.000.000
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		PAD	1	1.000.000
2 11 01 1.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		PAD	1	3.000.000

2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		PAD	86	40.000.000
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5	1.525.000.000
2 11 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		PAD	5	25.000.000
2 11 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya		PAD	1	1.500.000.000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14	37.000.000
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		PAD	1	2.500.000
2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		PAD	12	25.000.000
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		PAD	1	9.500.000
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			5	95.000.000
2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		PAD	3	60.000.000
2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		PAD	1	25.000.000
2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		PAD	1	10.000.000
	UPTD KPH GD	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Gunung Duren)	LH		90	261.500.000
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang teradministrasi sesuai dengan peraturan			1	1.000.000
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		PAD	1	1.000.000

2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah			90	142.500.000
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		PAD	1	25.000.000
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		PAD	1	45.000.000
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		PAD	1	2.500.000
2 11 01 1.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		PAD	1	5.000.000
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		PAD	86	45.000.000
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5	25.000.000
2 11 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		PAD	5	25.000.000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14	18.000.000
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		PAD	1	2.500.000
2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		PAD	12	12.000.000
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		PAD	1	3.500.000
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			32	75.000.000
2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		PAD	14	75.000.000

2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		PAD	1	-
2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		PAD	17	-
Tujuan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam					
Sasaran	01. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					
Arah Kebijakan	44. Peningkatan Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		LH		100	745.000.000
2 11 02 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			1	95.000.000
2 11 02 1.01 0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi		PAD	1	95.000.000
2 11 02 1.01 0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali		PAD	1	-
2 11 02 1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			0	650.000.000
2 11 02 1.02 0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun		PAD	1	-
2 11 02 1.02 0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	umlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan		PAD	7	250.000.000
2 11 02 1.02 0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi		PAD	1	262.000.000
2 11 02 1.02 0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun		PAD	1	138.000.000

2 11 03	ROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					338.000.000
		Persentase Titik Sampling Uji Kualitas Lingkungan (DLHK)	LH		67	112.000.000
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			3	112.000.000
2 11 03 1 01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		PAD	3	112.000.000
		Persentase Penurunan Emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan (DLHK)	LHK		100	226.000.000
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			3	226.000.000
2 11 03 1 01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan		PAD	1	76.000.000
2 11 03 1 01 0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK		PAD	1	50.000.000
2 11 03 1 01 0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun		PAD	1	100.000.000
2 11 03	ROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengujian Sampel Parameter Kualitas Lingkungan yang terlayani (Laboratorium Lingkungan)	Lingkungan Hidup		90	3.269.000.000
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Uji Sampel Parameter Kualitas Lingkungan Hidup			2000	3.269.000.000
2 11 03 1 01 0003	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		PAD	2000	3.269.000.000

2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati yang dilaksanakan	LH		100	100.000.000
2 11 04 1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dokumen rencana pengelolaan Keaneekaragaman hayati			1	100.000.000
2 11 04 1.01 0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		PAD	1	-
2 11 04 1.01 0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Kelembagaan/Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati		PAD	1	100.000.000
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	LH		100	91.000.000
2 11 05 1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1	91.000.000
2 11 05 1.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		PAD	1	42.000.000
2 11 05 1.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya		PAD	1	49.000.000

2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Usaha/ Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Lingkungan Hidup		70	154.000.000
2 11 06 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			163	154.000.000
2 11 06 1.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan		PAD	43	118.000.000
2 11 06 1.01 0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundangundangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawas		PAD	120	36.000.000
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase penyusunan Rekomendasi pengakuan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal dan Hak MHA terkait dengan PPLH	LH		100	-
2 11 07 1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Identifikasi potensi pengakuan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisoonal dan Hak MHA terkait dengan PPLH			1	-

2 11 07 1.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		PAD	1	-
2 11 07 1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan kepada MHA dan komunitas/ masyarakat yang memiliki kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH			6	-
2 11 07 1.02 0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan		PAD	1	-
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok swadaya masyarakat yang aktif dan mandiri	LH		80	317.000.000
2 11 08 1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			90	317.000.000
2 11 08 1.01 0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			158	146.000.000
2 11 08 1.01 0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah orang Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat			40	72.000.000
2 11 08 1.01 0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat		PAD	210	46.000.000

2 11 08 1.01 0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		PAD	35	53.000.000
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan	LH		85	125.000.000
2 11 09 1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah			3	125.000.000
2 11 09 1.01 0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			40	125.000.000
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diverifikasi	LH		100	69.000.000
2 11 10 1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diverifikasi			100	69.000.000
2 11 10 1.01 0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi		PAD	100	36.000.000
2 11 10 1.01 0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani		PAD	1	33.000.000
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan di TPA Regional	LH		10	-
2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			25	-

2 11 11 1.01 0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan			1	-
2 11 11 1.01 0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik			1	-
2 11 11 1.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan			1	-
2 11 11 1.01 0006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan			82000	-
2 11 11 1.01 0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia			8	-
Tujuan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam					
Sasaran	2. Peningkatan Tata Kelola Kehutanan					
Arah Kebijakan	45. Peningkatan Tata Kelola Kehutanan					3.773.316.500
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	(DLHK dan KPH)				3.003.669.500
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (DLHK)	K		35,61	420.500.000
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (DLHK)			0	-
3.28 03 1.01 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi			0	-
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen penyediaan data izin pemanfaatan HP dan HL (DLHK)			1	342.000.000
(3.28 03 1.03 0001	Penyediaan Data & Informasi Wilayah Usaha di Kawasan HP	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala		PAD	5	35.000.000

3.28 03 1.03 0002	Penyediaan Data & Informasi Wilayah Usaha di Kawasan HL	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	PAD	5	35.000.000
3.28 03 1.03 0003	Pelayanan Perizinan Berusaha/ Kerjasama melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan HP & HL pada Blok Pemanfaatan kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	PAD	0	30.000.000
3.28 03 1.03 0004	Koordinasi & Sinkronisasi Pengendalian izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan HP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	PAD	8	92.000.000
3.28 03 1.03 0005	Koordinasi & Sinkronisasi Pengendalian izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan HL	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	PAD	8	62.000.000
3.28 03 1.03 0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan HP	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	PAD	8	18.000.000
3.28 03 1.03 0007	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan HL	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	PAD	8	70.000.000
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas dan Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (DLHK)		2	15.000.000
3.28 03 1.06 0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	PAD	5	-
3.28 03 1.06 0004	(3.28 03 1.06 04) Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SIRPBBPHH	PAD	5	15.000.000
3 28 03 1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6.000m³/thn	Jumlah Dokumen Fasilitas dan Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6.000m³/thn (DLHK)		15	63.500.000

3.28 03 1.07 0002	Pembinaan Pelaksanaan Pengolahan HHK dengan Kapasitas Produksi <6.000m3/thn	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi			5	20.000.000
3.28 03 1.07 0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan IUIPHHK/ PBPH-HHK melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani		PAD	10	43.500.000
		Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Rambat Menduyung)	K		35,61	23.700.000
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			0	8.700.000
3.28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		PAD	1	8.700.000
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen data izin pemanfaatan HP dan HL			1	15.000.000
3.28 03 1.03 0001	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan		PAD	1	5.000.000
3.28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		PAD	1	10.000.000
		Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Jebu Bembang Antan)	Kehutanan		35,61	25.500.000
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPT KPH)			15	11.500.000

3.28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		PAD	1	11.500.000
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen data izin pemanfaatan HP dan HL			1	14.000.000
3.28 03 1.03 0001	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan		PAD	1	4.000.000
3.28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		PAD	1	10.000.000
		Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Bubus Panca)	K		35,61	27.000.000
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			0	12.000.000
3.28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		PAD	1	12.000.000
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen data izin pemanfaatan HP dan HL			1	15.000.000
3.28 03 1.03 0001	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan		PAD	1	5.000.000
3.28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		PAD	1	10.000.000
		Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin)	K		35,61	61.500.000
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			16	25.000.000

3.28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun			1	25.000.000
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen data izin pemanfaatan HP dan HL			1	36.500.000
3.28 03 1.03 0001	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan		PAD	1	25.000.000
3.28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		PAD	1	11.500.000
		Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Sungai Sembulan)	K		35,61	64.500.000
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			16	41.500.000
3.28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		PAD	1	41.500.000
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen data izin pemanfaatan HP dan HL			1	23.000.000
3.28 03 1.03 0001	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan		PAD	1	10.000.000
3.28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		PAD	8	13.000.000
		Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Muntai Palas)	K		35,61	43.000.000
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			16	30.000.000

3.28 03 1.01 02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		PAD	1	30.000.000
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen data izin pemanfaatan HP dan HL			1	13.000.000
3.28 03 1.03 0001	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan		PAD	1	13.000.000
		Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Belantu Mendanau)	K		35,61	50.000.000
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			16	15.000.000
3.28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun			1	15.000.000
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen data izin pemanfaatan HP dan HL			1	35.000.000
3.28 03 1.03 0001	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan		PAD	1	25.000.000
3.28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		PAD	1	10.000.000
		Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Gunung Duren)	K		35,61	70.000.000
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			16	30.000.000
3.28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		PAD	1	30.000.000

3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen data izin pemanfaatan HP dan HL			1	40.000.000
3.28 03 1.03 0001	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan		PAD	1	18.000.000
3.28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		PAD	8	22.000.000
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (DLHK)	K		20	1.394.000.000
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			155000	1.394.000.000
3.28 03 1.05 0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		PAD	100000	1.234.000.000
3.28 03 1.05 0002	Pencegahan & Pembatasan Kerusakan kawasan hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		PAD	55000	56.000.000
3.28 03 1.05 0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan		PAD	2	42.000.000
3.28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		PAD	1	-
3.28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		PAD	1	62.000.000
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Rambat Menduyung)	K		20	51.000.000
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			28000	51.000.000
3.28 03 1.05 0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		PAD	28000	31.000.000
3.28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		PAD	1	20.000.000

		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Jebu Bembang Antan)	K		20	51.000.000
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			26000	51.000.000
3.28 03 1.05 0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan			28000	31.000.000
3.28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun			1	20.000.000
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Bubus Panca)	K		20	23.000.000
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			15500	23.000.000
3.28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		PAD	15500	15.000.000
3.28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		PAD	1	8.000.000
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin)	K		20	24.000.000
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			29053	24.000.000
3.28 03 1.05 0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		PAD	29053	24.000.000
3.28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun			0	-
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Sungai Sembulan)	K		20	58.000.000

3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			22500	58.000.000
3.28 03 1.05 0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		PAD	22500	38.000.000
3.28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		PAD	1	20.000.000
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Muntai Palas)	K		20	31.000.000
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			22500	31.000.000
3.28 03 1.05 0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		PAD	22500	17.000.000
3.28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		PAD	1	14.000.000
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Belantu Mendanau)	K		20	14.000.000
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			22500	14.000.000
3.28 03 1.05 0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		PAD	22500	8.000.000
3.28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		PAD	1	6.000.000
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Gunung Duren)	K		20	35.000.000
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			22500	35.000.000

3.28 03 1.05 0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		PAD	22500	32.000.000
3.28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		PAD	1	3.000.000
		3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (DLHK)	K		13,17	99.600.000
3.28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			1	76.600.000
3.28 03 1.04 0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		DBH SAWIT	1	41.000.000
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		DBH SAWIT	2	10.000.000
3.28 03 1.04 0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		PAD	1	25.600.000
3.28 03 1.04 0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi		DBH SAWIT	1	-
3.28 03 1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Sumber Benih (DLHK)			5	23.000.000
3.28 03 1.09 0001	Penetapan Pengada Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi		PAD	1	-
3.28 03 1.09 0002	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan		PAD	1	16.000.000
3.28 03 1.09 0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar		PAD	5	7.000.000
		3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Rambat Menduyung)	K		13,17	83.040.000

3.28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			20	83.040.000
3.28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		DBH SAWIT	20	83.040.000
		3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Jebu Bembang Antan)	K		13,17	93.095.000
3.28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			20	93.095.000
3.28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		DBH SAWIT	20	93.095.000
3.28 03 1.04 0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi			1	-
		3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Bubus Panca)	K		13,17	65.697.500
(.28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			20	65.697.500
0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		DBH SAWIT	20	65.697.500
		3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Sigambir KotaWaringin)	K		13,17	43.190.000
3.28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			9	43.190.000
(.28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		DBH SAWIT	9	43.190.000
		3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Sungai Sembulan)	K		13,17	37.000.000

(.28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			2	37.000.000
(.28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		DBH SAWIT	2	37.000.000
		3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Muntai Palas)	K		13,17	31.347.000
(.28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			2	31.347.000
(.28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		DBH SAWIT	2	31.347.000
		3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Belantu Mendanau)	K		13,17	50.000.000
(.28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			2	50.000.000
(.28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		DBH SAWIT	2	50.000.000
3.28 03 1.04 0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi			1	-
		3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Gunung Duren)	K		13,17	34.000.000
3.28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			2	34.000.000
3.28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		DBH SAWIT	2	34.000.000
3.28 03 1.04 0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi			1	-

3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	(DLHK dan KPH)				125.000.000
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (DLHK)	K		100	125.000.000
3 28 04 1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi			2	33.000.000
3 28 04 1.02 0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		PAD	1	33.000.000
3 28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi (DLHK)			1	92.000.000
3 28 04 1.03 0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan		PAD	50	46.000.000
3 28 04 1.03 0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola		PAD	100	46.000.000
		Persentase Realisasi Penanaman pada Ekosistem Lahan Basah (UPT KPH Jebu Bembang Antan)	Kehutanan		90	-

28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi			5	-
3 28 04 1.03 0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani			5	-
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Realisasi Penanaman pada Ekosistem Lahan Basah (UPT KPH Belantu Mendanau)	K		90	-
(3 28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi			5	-
(3 28 04 1.03 0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani			5	-
		Persentase Realisasi Penanaman pada Ekosistem Lahan Basah (UPT KPH Gunung Duren)	K		90	-
3 28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi provinsi			5	-
3 28 04 1.03 0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani			5	-
3 28 05		(DLHK dan KPH)				428.147.000

3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (DLHK)	K		45	174.147.000
(3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Dokumen Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (DLHK)			1	174.147.000
3 28 05 1.01 0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		PAD	32	94.000.000
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		PAD	20	-
3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		DBH DR	116767	80.147.000
		Persentase akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPT KPH Rambat Menduyung)	K		45	30.000.000
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Dokumen Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			1	30.000.000
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		PAD	9	5.000.000
3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		PAD	1300	25.000.000
		Persentase akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPT KPH Jebu Bembang Antan)	LH		45	30.000.000
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Dokumen Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			1	30.000.000
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		PAD	3	5.000.000

3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		PAD	300	25.000.000
		Persentase akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Bubus Panca)	K		45	30.000.000
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Dokumen Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			1	30.000.000
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		PAD	6	5.000.000
3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		PAD	300	25.000.000
		Persentase akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin)	K		45	30.000.000
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Dokumen Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			1	30.000.000
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		PAD	5	5.000.000
3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		PAD	100	25.000.000
		Persentase akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Sungai Sembulan)	K		45	30.000.000
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Dokumen Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			1	30.000.000
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		PAD	2	5.000.000

3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		PAD	5000	25.000.000
		Persentase akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Muntai Palas)	K		45	30.000.000
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Dokumen Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			1	30.000.000
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		PAD	2	5.000.000
3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		PAD	107667	25.000.000
		Persentase akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Belantu Mendanau)	K		45	37.000.000
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Dokumen Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			1	37.000.000
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		PAD	14	7.000.000
3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		PAD	300	30.000.000
		Persentase akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Gunung Duren)	K		45	37.000.000
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Dokumen Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			1	37.000.000
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		PAD	20	7.000.000

3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		PAD	1800	30.000.000
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase luas DAS yang dikelola (DLHK)	K		9,13	216.500.000
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Luas Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			153005	216.500.000
3 28 06 1.01 0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan		PAD	1	19.500.000
3 28 06 1.01 0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS		PAD	6	25.000.000
3 28 06 1.01 0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		PAD	100	89.000.000
3 28 06 1.01 0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS		PAD	1	83.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam penyusunannya perlu memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbangprov tahunan untuk keterpaduan Rancangan Renja Dinas Kehutanan. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta usulan dari masyarakat.

Sebagai Dinas yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan, maka kebijakan yang diambil dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selalu diselaraskan dengan kebijakan umum Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pembantu Presiden dalam mencapai visi dan misi Nasional. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Tabel II.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD
Validasi Mitra Bappeda	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	1. Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah, Lampiran K. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Bidang 11. Persampahan, Daerah Provinsi : Penanganan sampah di TPA/TPST Regional. Dengan kewenangannya, provinsi tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana persampahan selain pengelolaan sampah regional

Verifikasi Perangkat Daerah	-	Validasi Sekretariat Dewan	Untuk diproses/ dibahas lebih lanjut	<p>1. Berdasarkan Permen LHK No 8 tahun 2021: kewenangan terhadap penerbitan, pencabutan, evaluasi dan monitoring Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sedang Pemerintah provinsi memiliki kewenangan terhadap pembinaan PBPH. Pemanfaatan hutan dapat dilaksanakan melalui kemitraan kehutanan.</p> <p>3. Dalam hal pemanfaatan kawasan hutan yang terdapat dalam PBPH HTI oleh masyarakat dapat dilaksanakan menggunakan mekanisme kemitraan dengan PBPH melalui persetujuan kementerian LHK. Kemitraan salah satu kewajiban PBPH dan memfasilitasi aspirasi warga yang ingin melaksanakan cocok tanam di wilayahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.</p>
-----------------------------	---	----------------------------	--------------------------------------	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 merupakan penjabaran tahun kelima atau tahun terakhir dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama, oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia. Sampai dengan Rancangan Awal RKPD ini disusun Rancangan RKP 2025 mengangkat tema **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**.

Penyusunan RKP dengan prinsip *money follows program* menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan secara holistik, tematik, terintegratif, dan spasial dalam perencanaan pembangunan diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

- Holistik-Tematik : untuk mencapai sasaran prioritas nasional, perlu koordinasi multi kementerian/lembaga.
- Integratif : pencapaian sasaran prioritas nasional perlu dilakukan secara terintegrasi dari berbagai sektor pembangunan dan jenjang pemerintahan.
- Spasial : perlu sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

RKP menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas Nasional (ProPN). Dengan mempertimbangan hal-hal di atas dan terutama dengan telah dimuatnya tema prioritas pembangunan tahun 2025 dalam RPJPD 2025-2045 maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 adalah “

Penguatan Pondasi Transformasi Sektor Unggulan yang Berkelanjutan dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah”.

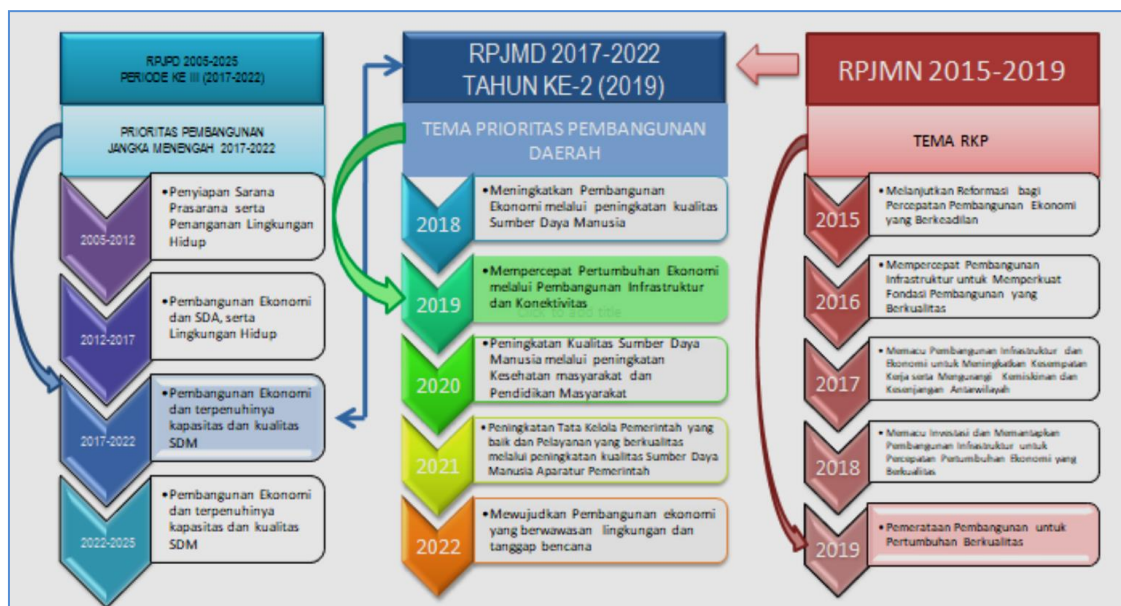
Makna tema:

- 1) **Pertumbuhan** menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

- 2) **Ekonomi** adalah konsep pembangunan yang dilakukan melalui kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan, pengembangan potensi ekonomi yang berdampak kuat pada pembangunan agri-bahari, seperti perkebunan, perikanan, pariwisata, serta pengembangan industri pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah pada hasil produk unggulan dengan mengedepankan azas pemerataan dan memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh wilayah untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, terutama untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra - sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan) termasuk upaya penanganan dan penataan kembali kerusakan lingkungan hidup pasca pertambangan)
- 3) **Pembangunan Infrastruktur** dimaknai sebagai upaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan adanya keterkaitan yang erat, intensif dan menyeluruh antarlevel pemerintahan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur atau sarana-prasarana yang memadai di perkotaan dan perdesaan.
- 4) **Konektivitas** dimaknai sebagai keterhubungan antar wilayah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

Gambar III.1

Posisi Tema Pembangunan RKPD Tahun 2025 Terhadap Tema RKP dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025

Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya visi misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022, maka pembangunan daerah tahun 2025 difokuskan untuk mencapai tujuan pembangunan : meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat, serta

meningkatnya infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah. Hubungan antara visi-misi dan tujuan-sasaran pembangunan 2025-2029 disajikan pada Tabel III.1.

Tabel III.1
Hubungan Visi-Misi dan Tujuan-Sasaran Pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029

Visi RPJMD 2017-2022 :

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

No.	Tujuan	Sasaran
1	2	3
Misi I. Meningkatkan pembanguanaan ekonomi berbasis potensi daerah		
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan 2. Meningkatnya produksi sub sektor perikanan 3. Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata 4. Meningkatnya produksi sektor pertambangan 5. Meningkatnya pembangunan berbasis industri 6. Terwujudnya kemandirian energi
2	Meningkatkan pendapatan Pemerintah dan masyarakat	1. Meningkatnya belanja pemerintah Daerah 2. Menurunnya angka Pengangguran 3. Menurunnya angka kemiskinan 4. Menurunnya angka Inflasi 5. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
Misi III. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal		
3	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	1. Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat
Misi IV. Meningkatkan kesehatan masyarakat		
4	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	1. Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat
Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi		
6	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel 2. Birokrasi yang efektif dan efisien 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang

No.	Tujuan	Sasaran
1	2	3
		berkualitas
7	Meningkatkan pembangunan demokrasi	1. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi
Misi VI . Pengendalian bencana dankualitas lingkungan hidup		
8	Meningkatkan tata kelola kebencanaan	1. Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana
9	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup	1. Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup

Berdasarkan Tabel III.1 di atas, diketahui bahwa untuk mewujudkan visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 akan dilaksanakan melalui 6 (enam) misi yang diharapkan dapat mencapai 9 (sembilan) tujuan yang ditandai dengan 21 sasaran. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan misi dapat dilihat dari target capaian indikator sasaran pembangunan. Adapun target sasaran makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disandingkan dengan target Nasional yang akan dicapai pada Tahun 2018 dan 2025 dapat dilihat pada Tabel III.2.

Tabel III.2
Target Sasaran Pembangunan
Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan 2025

Indikator	Tahun 2018		Tahun 2025					Proyeksi, Bappenas 24 Januari 2018
	Nasional	Babel	Nasional		Babel			
	RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018	Bappenas, 24 Januari 2018	RPJMN 2015-2025	RPJMN 2015-2025	RPJPD-P 2005-2025	RPJMD 2017-2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,1	6,26	8,0	5,4-5,8	7,5	5,25	5,30	5,34
Tingkat Kemiskinan %	9,95	4,42	7,0-8,0	7,0-8,0	2,7	-	4,15	-
Tingkat Pengangguran %	4,6-5,1	4,17	4,0-5,0	4,0-5,0	2,7	-	5,6	-
Gini Ratio	0,35	0,27	0,36	0,36	-	0,258	-	-
IPM	75,7	69,92	76,3	71,98	-	70,33	-	-
Laju Inflasi (%)	3,5	3,8	3,5	2,5-4,5	-	-	6,31	-

Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022 serta

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Agar tercapainya Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas pembangunan didasari dari : 1) hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan, 2) isu strategis global/nasional/daerah, 3) arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan, 4) arahan RPJMD 2017-2022 untuk tahun 2025.

Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk :

- 1) pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDG's, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan;
- 2) pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
- 3) pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
- 4) penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun 2025. Dalam penentuan prioritas pembangunan, telah diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal dan eksternal, sebagaimana telah diuraikan pada bab II. Dengan demikian suatu program pembangunan daerah merupakan program atau kumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yang didasarkan pada hasil perumusan secara teknokratis.

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

- 1) Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;
- 2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- 3) Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2017-2022;
- 4) Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2025;
- 5) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;

- 6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
- 7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 (RPJMN 2015-2025): **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2025, sesuai dengan (RPJMN 2015-2025), antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen (*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 7,9 persen; Jawa-bali sebesar 7,4-8,2 persen; Nusa Tenggara sebesar 7,3-8,1 persen; Kalimantan sebesar 7,3-8,0 persen; Sulawesi sebesar 8,7-9,6 persen; Maluku sebesar 7,8-8,6 persen dan Papua sebesar 16,5-18,2 persen;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 7,0-8,0 persen (*); dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah : Sumatera sebesar 7,3 persen; Jawa-bali sebesar 5,5-5,0 persen; Nusa Tenggara sebesar 9,6-8,7 persen; Kalimantan sebesar 3,4-3,1 persen; Sulawesi sebesar 5,8-5,3 persen; Maluku sebesar 7,6-6,9 persen dan Papua sebesar 15,9-14,4 persen;
3. Pencapaian target tingkat pengangguran sebesar 4,0-5,0 persen (*); dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah : Sumatera sebesar 5,0-4,5 persen; Jawa-bali sebesar 5,8-5,2 persen; Nusa Tenggara sebesar 3,3-3,0 persen; Kalimantan sebesar 4,2-3,8 persen; Sulawesi sebesar 4,1-3,7 persen; Maluku sebesar 4,9-4,4 persen dan Papua sebesar 2,9-2,6 persen; dan
4. Sasaran laju inflasi 3,5.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dapat dilihat dari kesamaan indikator makro yang digunakan untuk menjadi target pembangunan secara makro baik di tingkat nasional, regional dan daerah yang tertuang dalam tabel IV.4 dibawah.

Tabel IV.4

Keselarasan target indikator pembangunan makro antara target Nasional, Regional Sumatera dan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

Indikator	Tahun 2025		
	Nasional	Sumatera	Babel
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	8	7,2-8,0	5,3
Tingkat Kemiskinan %	7,0-8,0	5,6-5,1	4,15
Tingkat Pengangguran %	4,0-5,0	5,0-4,5	5,6
Laju Inflasi (%)	3,5	*	6,1

*) data tidak tersedia

Sumber: RKP 2025, RPJMN 2015-2025, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Renja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun sebagai acuan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan	Indeks reformasi birokrasi	69,00	70,00	71,00	72,00
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Meningkatkan pengendalian lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	75,43	75,84	76,70	77,50
		Peningkatan tata Kelola kehutanan	Persentase luas hutan yang dikelola masyarakat dan perizinan berusaha lainnya	43,37	44,16	44,91	45,52

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan dan Capaian Renja PD Tahun 2023

Rumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Renja Tahun 2023 disesuaikan dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Renja tersebut juga dirumuskan untuk mendukung pencapaian kinerja Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah program dan kegiatan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 terdiri atas 15 (lima belas) Program dengan 31 (tiga puluh satu) Kegiatan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2023 melaksanakan 15 (lima belas) program dengan 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Kesembilan program kegiatan tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi,
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup,
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup,
4. Program Keanekaragaman Hayati (KEHATI),
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3),
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH,
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat,
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat,
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup,
11. Program Pengelolaan

Persampahan, 12. Program Pengelolaan Hutan, 13. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, 14. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan, 15. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 8 (delapan) kegiatan, terdiri dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada program Perencanaan Lingkungan Hidup melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi.

Pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pada Program Keanekaragaman Hayati (KEHATI) melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi.

Pada Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Pada program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pada Program Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan

Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.

Pada program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi.

Pada Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat melaksanakan 1(satu) kegiatan, yaitu kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi.

Pada program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi.

Pada Program Pengelolaan Persampahan melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional.

Pada program Pengelolaan Hutan melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan, terdiri dari kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi, kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di luar Kawasan Hutan Negara, kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil hutan Bukan Kayu (HHBK), kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/tahun, dan kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan.

Pada program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES (*Convension On International Trade In Endangered Species*) untuk Kewenangan Daerah Provinsi, dan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Pada progam Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di BidangKehutanan.

Pada program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 sesuai dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Target dan realisasi (kinerja dan keuangan) yang terdapat dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 hampir semuanya mengacu kepada Renstra Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan, sebanyak di 15 program dengan 31 kegiatan.
2. Realisasi program/kegiatan yang menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal, sebanyak di 12 program dengan 28 kegiatan.
3. Realisasi program/kegiatan yang menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian, sebanyak di 8 program dengan 20 kegiatan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :
 - 1) Proses administrasi pembayaran terlambat.
 - 2) Kondisi cuaca/iklim yang mempengaruhi pelaksanaan penanaman,
 - 3) Ketersediaan dana tepat waktu,
 - 4) Terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target adalah :
 - 1) konsisten dalam perencanaan untuk penentuan kegiatan dan penganggaran,
 - 2) pengumpulan data/keterangan yang valid, dan
 - 3) menentukan kegiatan dari program yang realistis.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana ditampilkan pada lampiran Tabel 2.1.

Xxxxxxx

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD mengacu pada IKK, IKU serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangannya berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengampu Urusan Lingkungan Hidup yang

merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Kehutanan yang merupakan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Sejak muncul UU nomor 23 tahun 2014
 PP nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah
 TC.30 halaman 404 lampiran 86
 Target dan realisasi
 Target di renstra
 IKU

Pengukuran capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan Renstra Tahun 2023-2026 dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) oleh Kementerian Dalam Negeri :

1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi

Konsep/Definisi	:	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi
Rumus	:	IKLH Prov = (IKA 30%) + (IKU 30%) + (ITH 40 %)
		IKA = Indeks Kualitas Air
		IKU = Indeks Kualitas Udara
		IKL = Indeks Kualitas Lahan
		IKAL = Indeks Kualitas Air Laut
Keterangan	:	IKLH Prov = 71,64 IKA = 57,51 IKU = 90,15 IKL = 40,09 IKAL=82,57

2. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Rumus	:	<i>Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi</i> <i>Usaha dan atau</i>

		18
		$\times 100\% = 18,95\%$
		95
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan • Yang dimaksud dengan izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia • Dibuktikan dengan dokumen peringkat ketaatan hasil pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup tahun anggaran 2023

3. Peningkatan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial

$$\frac{\text{Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberikan akses legal}}{\text{Jumlah Total Usulan KTH yang Teregistrasi}} \times 100\% =$$

$$= \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis

$$\frac{\text{Lahan Kritis di Provinsi yang direhabilitasi (Ha)}}{\text{Luas Lahan Kritis di Provinsi}} \times 100\% =$$

$$= \frac{5.619,91}{167.104} \times 100\% = 3,36$$

Catatan :

1. Lahan Kritis adalah lahan yang tidak produktif meskipun dikelola produktifitas lahan sangat rendah bahkan dapat terjadi hasil produksi yang diterima jauh lebih sedikit dari biaya produksinya. Lahan kritis bersifat tandus, gundul dan tidak dapat digunakan untuk usaha pertanian karena tingkat kesuburan rendah. (Pedoman Penyusunan LPPD 2021, Kementerian Dalam Negeri).
2. Luas Lahan Kritis Tahun 2022 berdasarkan rewiw BPDAS Tahun 2022 seluas ± 167.104 Hektar

5. Kerusakan Kawasan Hutan

$$\frac{\text{Jumlah Hutan yang Rusak}}{\text{Jumlah Hutan Keseluruhan}} \times 100\% = \text{Persentase kerusakan hutan}$$

$$= \frac{15.365,10}{652.641,52} \times 100\% = 2,354\%$$

Catatan:

Kerusakan hutan disebabkan oleh kebakaran hutan, penebangan hutan secara liar, pembabatan hutan dengan sengaja (Pedoman Penyusunan LPPD 2021, Kementerian Dalam Negeri).

Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh Kementerian PAN dan RB :

1. Persentase pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) per tahun, Formulasi Perhitungan : (Nilai IKLH yang diperoleh) / (target nilai IKLH) x 100%.
2. Luas hutan yang dikelola masyarakat dan perizinan berusaha lainnya, Formulasi Perhitungan : (Jumlah luas pemanfaatan hutan dan luas perhutanan sosial di hutan lindung dan hutan produksi) / (Luas Kawasan hutan lindung dan hutan produksi) x 100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Salah satu masalah yang menonjol di sektor kehutanan adalah masih tingginya luas lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tingginya lahan kritis ini disebabkan *illegal logging* (pembalakan liar) dan *illegal minning* (pertambangan liar) yang terjadi dalam kawasan hutan.

Merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang harus diselesaikan, agar dapat meningkatkan tutupan kawasan hutan sehingga akan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya hutan. Tolak ukur yang dapat dilihat dari keberhasilan peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya hutan adalah:

1. Pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung melalui operasional UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan perhutanan sosial untuk meningkatkan PNBPN dan PAD;
2. Peningkatan upaya reboisasi, rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi lahan bekas tambang;
3. Pelaksanaan perlindungan, pengamanan hutan dan konservasi sumberdaya alam sebagai upaya penurunan kerusakan hutan serta pengelolaan jasa lingkungan dan wisata alam yang belum optimal.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan ruang gerak yang luas bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi, tantangan tersebut adalah :

1. Penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Hutan melalui pembentukan 8 Kesatuan Pengelolaan Hutan yang beroperasi Kesatuan Pengelolaan Hutan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Belum optimalnya pengelolaan persampahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui Perhutanan Sosial program Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Desa (HD) yang masih belum optimal;
5. Koordinasi dengan berbagai stakeholder yang belum berjalan dengan baik;
6. Belum terfokusnya perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka awal pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang didapat yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat, stakeholder dan pemerintah sendiri. Rancangan awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD.

Rancangan awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap PD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap PD dalam menyiapkan rancangan Renja PD.

Review rancangan awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan dengan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan tahun 2024. Proses perbandingan ini dilakukan agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki informasi terhadap perencanaan yang telah dilakukan dan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.

2.6.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

Rencana Program Prioritas

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut :

A. Program yang dilaksanakan setiap OPD :

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan;
2. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Peningkatan Disiplin Aparatur;
5. Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
8. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

C. Urusan Pilihan

Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 untuk urusan pilihan adalah sebagai berikut :

4. Urusan Kehutanan

- a. Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA dan Ekosistem
- b. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan
- c. Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
- d. Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat

2.6.2 Pagu Indikatif

Pagu Indikatif merupakan batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing OPD untuk merencanakan program/kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penentuan pagu indikatif tidak lagi menganut “*money follow function*” akan tetapi berasaskan “*money follow priority programme*”.

Pagu indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 pada Ranwal RKPD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp20.974.949.000,-.

Tabel. II.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Urusan	Sumber Dana	PAGU TAHUN 2025	
					PI 2025 DINAS + UPTD	
					Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7
						50.599.000.576,86
Unit	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					50.710.940.576,86
Tujuan	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi					
Sasaran	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan					
Arah Kebijakan	Peningkatan Pelayan Internal Perangkat Daerah					41.729.624.077
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS DAN UPT				41.729.624.077
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS LHK				36.454.349.077
	DINAS	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DLHK)	LH		83	185.000.000
2 11 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16	185.000.000
2 11 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		PAD	4	140.000.000
2 11 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		PAD	1	-
2 11 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		PAD	1	-

2 11 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		PAD	1	-
2 11 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PAD	7	25.000.000
	DINAS	2. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DLHK)	LH		90	36.269.349.077
2 11 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan				31.988.000.000
2 11 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		PAD	225	31.965.000.000
2 11 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		PAD	1	-
2 11 01 1.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		PAD	1	5.000.000
2 11 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		PAD	1	8.000.000
2 11 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang teradministrasi sesuai dengan peraturan			9	75.000.000
2 11 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		PAD	1	-
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		PAD	8	75.000.000

2 11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian			239	10.000.000
2 11 01 1.05 0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		PAD	225	-
2 11 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		PAD	4	-
2 11 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		PAD	10	10.000.000
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah			128	695.000.000
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		PAD	4	75.000.000
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		PAD	4	100.000.000
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		PAD	2	50.000.000
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		PAD	4	50.000.000
2 11 01 1.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material		PAD	4	80.000.000
2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		PAD	10	40.000.000
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		PAD	100	300.000.000
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan			5	200.000.000
2 11 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		PAD	1	-
2 11 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		PAD	0	-
2 11 01 1.07 0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		PAD	0	-
2 11 01 1.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		PAD	4	200.000.000

2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36	2.301.349.077
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		PAD	12	25.000.000
2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		PAD	12	400.000.000
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		PAD	12	1.876.349.077
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			52	1.000.000.000
2 11 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		PAD	5	50.000.000
2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		PAD	10	250.000.000
2 11 01 1.09 0007	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		PAD	28	200.000.000
2 11 01 1.09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		PAD	0	50.000.000
2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		PAD	4	150.000.000
2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		PAD	5	300.000.000
	UPTD LAB LINGKUNGAN	2. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD Laboratorium Lingkungan)	LH		90	1.765.750.000
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah			22071	749.400.000
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		PAD	22000	25.000.000
2 11 01 1.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material		PAD	60	627.000.000

2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		PAD	1	9.000.000
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		PAD	10	88.400.000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			260	871.350.000
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		PAD	232	44.145.000
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		PAD	28	827.205.000
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			38	145.000.000
2 11 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		PAD	38	145.000.000
	UPTD KPH RM	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Rambat Menduyung)	LH		90	264.500.000
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.000.000
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		PAD	1	1.000.000
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah				85.500.000
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		PAD	4	8.000.000
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		PAD	1	5.000.000
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		PAD	1	30.000.000
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		PAD	2	2.000.000
2 11 01 1.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		PAD	2	4.000.000

2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		PAD	1	1.500.000
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		PAD	1	35.000.000
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3	30.000.000
2 11 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		PAD	3	30.000.000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36	43.000.000
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		PAD	12	1.000.000
2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		PAD	12	37.000.000
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		PAD	12	5.000.000
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			15	105.000.000
2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		PAD	10	80.000.000
2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		PAD	4	15.000.000
2 11 01 1.09 1011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		PAD	1	10.000.000
	UPTD KPH JBA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Jebu Bembang Antan)	LH		90	215.500.000
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang teradministrasi sesuai dengan peraturan				1.000.000

2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PAD	1	1.000.000
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah			65.500.000
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD	4	2.000.000
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD	3	22.000.000
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	PAD	1	2.000.000
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	PAD	2	2.500.000
2 11 01 1.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	PAD	2	1.000.000
2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	PAD	1	1.000.000
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD	1	35.000.000
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3	25.000.000
2 11 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	PAD	3	25.000.000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3	44.000.000
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD	1	1.000.000
2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD	1	37.000.000
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	PAD	1	6.000.000
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		27	80.000.000
2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	PAD	7	70.000.000

2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		PAD	1	-
2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		PAD	19	10.000.000
	UPTD KPH BP	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Bubus Panca)	LH		90	209.525.000
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang teradministrasi sesuai dengan peraturan				1.000.000
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		PAD	1	1.000.000
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah				45.025.000
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		PAD	2	2.000.000
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		PAD	3	7.725.000
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		PAD	1	1.600.000
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		PAD	2	2.500.000
2 11 01 1.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material		PAD	2	5.000.000
2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		PAD	1	1.200.000
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		PAD	76	25.000.000
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3	25.000.000
2 11 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		PAD	3	25.000.000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	43.000.000
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		PAD	1	1.000.000

2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		PAD	1	37.000.000
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		PAD	1	5.000.000
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			9	95.500.000
2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		PAD	3	60.500.000
2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		PAD	1	25.000.000
2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		PAD	5	10.000.000
	UPTD KPH SKW	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Sigambir Kota Waringin)	LH		90	259.500.000
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang teradministrasi sesuai dengan peraturan				1.000.000
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		PAD	2	1.000.000
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah				97.000.000
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		PAD	1	8.000.000
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		PAD	1	25.000.000
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		PAD	1	9.500.000
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		PAD	1	2.000.000
2 11 01 1.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material		PAD	1	20.000.000
2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		PAD	1	2.500.000

2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		PAD	86	30.000.000
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2	25.000.000
2 11 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		PAD	2	25.000.000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			24	27.500.000
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		PAD	10	1.000.000
2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		PAD	12	24.000.000
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		PAD	2	2.500.000
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			22	109.000.000
2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		PAD	6	50.000.000
2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		PAD	1	50.000.000
2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		PAD	15	9.000.000
	UPTD KPH SS	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Sungai Sembulan)	LH		90	241.000.000
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang teradministrasi sesuai dengan peraturan				1.000.000
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		PAD	2	1.000.000

2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah				101.000.000
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		PAD	1	25.000.000
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		PAD	1	3.000.000
2 11 01 1.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		PAD	1	3.000.000
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		PAD	86	40.000.000
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5	25.000.000
2 11 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		PAD	5	25.000.000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14	29.000.000
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		PAD	1	2.000.000
2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		PAD	12	24.000.000
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		PAD	1	3.000.000
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			5	85.000.000
2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		PAD	3	60.000.000

2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		PAD	1	15.000.000
2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		PAD	1	10.000.000
	UPTD KPH MP	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Muntai Palas)	LH		90	271.000.000
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang teradministrasi sesuai dengan peraturan				1.000.000
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		PAD	1	1.000.000
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah				87.500.000
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		PAD	1	2.000.000
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		PAD	1	13.000.000
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		PAD	1	9.500.000
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		PAD	1	5.000.000
2 11 01 1.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		PAD	1	3.000.000
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		PAD	86	45.000.000
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1	25.000.000
2 11 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		PAD	1	25.000.000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14	27.500.000
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		PAD	1	2.500.000

2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		PAD	12	15.000.000
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			5	130.000.000
2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		PAD	3	75.000.000
2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		PAD	1	50.000.000
2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		PAD	1	5.000.000
	UPTD KPH BM	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Belantu Mendanau)	LH		90	1.787.000.000
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang teradministrasi sesuai dengan peraturan				1.000.000
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		PAD	1	1.000.000
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah				129.000.000
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		PAD	1	25.000.000
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		PAD	1	40.000.000
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		PAD	1	1.000.000
2 11 01 1.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		PAD	1	3.000.000

2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		PAD	86	40.000.000
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5	1.525.000.000
2 11 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		PAD	5	25.000.000
2 11 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya		PAD	1	1.500.000.000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14	37.000.000
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		PAD	1	2.500.000
2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		PAD	12	25.000.000
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		PAD	1	9.500.000
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			5	95.000.000
2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		PAD	3	60.000.000
2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		PAD	1	25.000.000
2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		PAD	1	10.000.000
	UPTD KPH GD	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Gunung Duren)	LH		90	261.500.000
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang teradministrasi sesuai dengan peraturan			1	1.000.000
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		PAD	1	1.000.000

2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah			90	142.500.000
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		PAD	1	25.000.000
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		PAD	1	45.000.000
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		PAD	1	2.500.000
2 11 01 1.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material		PAD	1	10.000.000
2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		PAD	1	5.000.000
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		PAD	86	45.000.000
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5	25.000.000
2 11 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		PAD	5	25.000.000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14	18.000.000
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		PAD	1	2.500.000
2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		PAD	12	12.000.000
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		PAD	1	3.500.000
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			32	75.000.000
2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		PAD	14	75.000.000

2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		PAD	1	-
2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		PAD	17	-
Tujuan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam					
Sasaran	01. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					
Arah Kebijakan	44. Peningkatan Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					5.208.000.000
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	LH		100	745.000.000
2 11 02 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			1	95.000.000
2 11 02 1.01 0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi		PAD	1	95.000.000
2 11 02 1.01 0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali		PAD	1	-
2 11 02 1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			0	650.000.000
2 11 02 1.02 0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun		PAD	1	-
2 11 02 1.02 0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	umlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan		PAD	7	250.000.000
2 11 02 1.02 0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi		PAD	1	262.000.000
2 11 02 1.02 0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun		PAD	1	138.000.000

2 11 03	ROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					338.000.000
		Persentase Titik Sampling Uji Kualitas Lingkungan (DLHK)	LH		67	112.000.000
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			3	112.000.000
2 11 03 1 01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		PAD	3	112.000.000
		Persentase Penurunan Emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan (DLHK)	LHK		100	226.000.000
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			3	226.000.000
2 11 03 1 01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan		PAD	1	76.000.000
2 11 03 1 01 0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK		PAD	1	50.000.000
2 11 03 1 01 0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun		PAD	1	100.000.000
2 11 03	ROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengujian Sampel Parameter Kualitas Lingkungan yang terlayani (Laboratorium Lingkungan)	Lingkungan Hidup		90	3.269.000.000
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Uji Sampel Parameter Kualitas Lingkungan Hidup			2000	3.269.000.000
2 11 03 1 01 0003	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		PAD	2000	3.269.000.000

2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati yang dilaksanakan	LH		100	100.000.000
2 11 04 1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dokumen rencana pengelolaan Keaneekaragaman hayati			1	100.000.000
2 11 04 1.01 0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		PAD	1	-
2 11 04 1.01 0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Kelembagaan/Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati		PAD	1	100.000.000
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	LH		100	91.000.000
2 11 05 1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1	91.000.000
2 11 05 1.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		PAD	1	42.000.000
2 11 05 1.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya		PAD	1	49.000.000

2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Usaha/ Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Lingkungan Hidup		70	154.000.000
2 11 06 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			163	154.000.000
2 11 06 1.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan		PAD	43	118.000.000
2 11 06 1.01 0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundangundangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawas		PAD	120	36.000.000
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase penyusunan Rekomendasi pengakuan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal dan Hak MHA terkait dengan PPLH	LH		100	-
2 11 07 1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Identifikasi potensi pengakuan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisoonal dan Hak MHA terkait dengan PPLH			1	-

2 11 07 1.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		PAD	1	-
2 11 07 1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan kepada MHA dan komunitas/ masyarakat yang memiliki kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH			6	-
2 11 07 1.02 0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan		PAD	1	-
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok swadaya masyarakat yang aktif dan mandiri	LH		80	317.000.000
2 11 08 1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			90	317.000.000
2 11 08 1.01 0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			158	146.000.000
2 11 08 1.01 0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah orang Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat			40	72.000.000
2 11 08 1.01 0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat		PAD	210	46.000.000

2 11 08 1.01 0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		PAD	35	53.000.000
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan	LH		85	125.000.000
2 11 09 1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah			3	125.000.000
2 11 09 1.01 0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			40	125.000.000
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diverifikasi	LH		100	69.000.000
2 11 10 1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diverifikasi			100	69.000.000
2 11 10 1.01 0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi		PAD	100	36.000.000
2 11 10 1.01 0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani		PAD	1	33.000.000
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan di TPA Regional	LH		10	-
2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			25	-

2 11 11 1.01 0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan			1	-
2 11 11 1.01 0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik			1	-
2 11 11 1.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan			1	-
2 11 11 1.01 0006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan			82000	-
2 11 11 1.01 0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia			8	-
Tujuan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam					
Sasaran	2. Peningkatan Tata Kelola Kehutanan					
Arah Kebijakan	45. Peningkatan Tata Kelola Kehutanan					3.773.316.500
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	(DLHK dan KPH)				3.003.669.500
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (DLHK)	K		35,61	420.500.000
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (DLHK)			0	-
3.28 03 1.01 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi			0	-
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen penyediaan data izin pemanfaatan HP dan HL (DLHK)			1	342.000.000
(3.28 03 1.03 0001	Penyediaan Data & Informasi Wilayah Usaha di Kawasan HP	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala		PAD	5	35.000.000

3.28 03 1.03 0002	Penyediaan Data & Informasi Wilayah Usaha di Kawasan HL	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	PAD	5	35.000.000
3.28 03 1.03 0003	Pelayanan Perizinan Berusaha/ Kerjasama melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan HP & HL pada Blok Pemanfaatan kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	PAD	0	30.000.000
3.28 03 1.03 0004	Koordinasi & Sinkronisasi Pengendalian izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan HP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	PAD	8	92.000.000
3.28 03 1.03 0005	Koordinasi & Sinkronisasi Pengendalian izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan HL	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	PAD	8	62.000.000
3.28 03 1.03 0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan HP	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	PAD	8	18.000.000
3.28 03 1.03 0007	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan HL	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	PAD	8	70.000.000
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas dan Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (DLHK)		2	15.000.000
3.28 03 1.06 0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	PAD	5	-
3.28 03 1.06 0004	(3.28 03 1.06 04) Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SIRPBBPHH	PAD	5	15.000.000
3 28 03 1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6.000m³/thn	Jumlah Dokumen Fasilitas dan Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6.000m³/thn (DLHK)		15	63.500.000

3.28 03 1.07 0002	Pembinaan Pelaksanaan Pengolahan HHK dengan Kapasitas Produksi <6.000m3/thn	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi			5	20.000.000
3.28 03 1.07 0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan IUIPHHK/ PBPH-HHK melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani		PAD	10	43.500.000
		Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Rambat Menduyung)	K		35,61	23.700.000
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			0	8.700.000
3.28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		PAD	1	8.700.000
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen data izin pemanfaatan HP dan HL			1	15.000.000
3.28 03 1.03 0001	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan		PAD	1	5.000.000
3.28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		PAD	1	10.000.000
		Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Jebu Bembang Antan)	Kehutanan		35,61	25.500.000
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPT KPH)			15	11.500.000

3.28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		PAD	1	11.500.000
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen data izin pemanfaatan HP dan HL			1	14.000.000
3.28 03 1.03 0001	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan		PAD	1	4.000.000
3.28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		PAD	1	10.000.000
		Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Bubus Panca)	K		35,61	27.000.000
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			0	12.000.000
3.28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		PAD	1	12.000.000
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen data izin pemanfaatan HP dan HL			1	15.000.000
3.28 03 1.03 0001	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan		PAD	1	5.000.000
3.28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		PAD	1	10.000.000
		Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin)	K		35,61	61.500.000
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			16	25.000.000

3.28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun			1	25.000.000
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen data izin pemanfaatan HP dan HL			1	36.500.000
3.28 03 1.03 0001	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan		PAD	1	25.000.000
3.28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		PAD	1	11.500.000
		Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Sungai Sembulan)	K		35,61	64.500.000
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			16	41.500.000
3.28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		PAD	1	41.500.000
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen data izin pemanfaatan HP dan HL			1	23.000.000
3.28 03 1.03 0001	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan		PAD	1	10.000.000
3.28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		PAD	8	13.000.000
		Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Muntai Palas)	K		35,61	43.000.000
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			16	30.000.000

3.28 03 1.01 02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		PAD	1	30.000.000
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen data izin pemanfaatan HP dan HL			1	13.000.000
3.28 03 1.03 0001	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan		PAD	1	13.000.000
		Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Belantu Mendanau)	K		35,61	50.000.000
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			16	15.000.000
3.28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun			1	15.000.000
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen data izin pemanfaatan HP dan HL			1	35.000.000
3.28 03 1.03 0001	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan		PAD	1	25.000.000
3.28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		PAD	1	10.000.000
		Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Gunung Duren)	K		35,61	70.000.000
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			16	30.000.000
3.28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		PAD	1	30.000.000

3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen data izin pemanfaatan HP dan HL			1	40.000.000
3.28 03 1.03 0001	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan		PAD	1	18.000.000
3.28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		PAD	8	22.000.000
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (DLHK)	K		20	1.394.000.000
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			155000	1.394.000.000
3.28 03 1.05 0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		PAD	100000	1.234.000.000
3.28 03 1.05 0002	Pencegahan & Pembatasan Kerusakan kawasan hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		PAD	55000	56.000.000
3.28 03 1.05 0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan		PAD	2	42.000.000
3.28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		PAD	1	-
3.28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		PAD	1	62.000.000
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Rambat Menduyung)	K		20	51.000.000
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			28000	51.000.000
3.28 03 1.05 0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		PAD	28000	31.000.000
3.28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		PAD	1	20.000.000

		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Jebu Bembang Antan)	K		20	51.000.000
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			26000	51.000.000
3.28 03 1.05 0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan			28000	31.000.000
3.28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun			1	20.000.000
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Bubus Panca)	K		20	23.000.000
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			15500	23.000.000
3.28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		PAD	15500	15.000.000
3.28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		PAD	1	8.000.000
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin)	K		20	24.000.000
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			29053	24.000.000
3.28 03 1.05 0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		PAD	29053	24.000.000
3.28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun			0	-
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Sungai Sembulan)	K		20	58.000.000

3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			22500	58.000.000
3.28 03 1.05 0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		PAD	22500	38.000.000
3.28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		PAD	1	20.000.000
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Muntai Palas)	K		20	31.000.000
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			22500	31.000.000
3.28 03 1.05 0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		PAD	22500	17.000.000
3.28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		PAD	1	14.000.000
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Belantu Mendanau)	K		20	14.000.000
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			22500	14.000.000
3.28 03 1.05 0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		PAD	22500	8.000.000
3.28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		PAD	1	6.000.000
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Gunung Duren)	K		20	35.000.000
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			22500	35.000.000

3.28 03 1.05 0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		PAD	22500	32.000.000
3.28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		PAD	1	3.000.000
		3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (DLHK)	K		13,17	99.600.000
3.28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			1	76.600.000
3.28 03 1.04 0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		DBH SAWIT	1	41.000.000
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		DBH SAWIT	2	10.000.000
3.28 03 1.04 0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		PAD	1	25.600.000
3.28 03 1.04 0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi		DBH SAWIT	1	-
3.28 03 1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Sumber Benih (DLHK)			5	23.000.000
3.28 03 1.09 0001	Penetapan Pengada Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi		PAD	1	-
3.28 03 1.09 0002	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan		PAD	1	16.000.000
3.28 03 1.09 0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar		PAD	5	7.000.000
		3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Rambat Menduyung)	K		13,17	83.040.000

3.28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			20	83.040.000
3.28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		DBH SAWIT	20	83.040.000
		3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Jebu Bembang Antan)	K		13,17	93.095.000
3.28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			20	93.095.000
3.28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		DBH SAWIT	20	93.095.000
3.28 03 1.04 0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi			1	-
		3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Bubus Panca)	K		13,17	65.697.500
(.28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			20	65.697.500
0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		DBH SAWIT	20	65.697.500
		3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Sigambir KotaWaringin)	K		13,17	43.190.000
3.28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			9	43.190.000
(.28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		DBH SAWIT	9	43.190.000
		3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Sungai Sembulan)	K		13,17	37.000.000

(.28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			2	37.000.000
(.28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		DBH SAWIT	2	37.000.000
		3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Muntai Palas)	K		13,17	31.347.000
(.28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			2	31.347.000
(.28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		DBH SAWIT	2	31.347.000
		3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Belantu Mendanau)	K		13,17	50.000.000
(.28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			2	50.000.000
(.28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		DBH SAWIT	2	50.000.000
3.28 03 1.04 0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi			1	-
		3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Gunung Duren)	K		13,17	34.000.000
3.28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			2	34.000.000
3.28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		DBH SAWIT	2	34.000.000
3.28 03 1.04 0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi			1	-

3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	(DLHK dan KPH)				125.000.000
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (DLHK)	K		100	125.000.000
3 28 04 1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi			2	33.000.000
3 28 04 1.02 0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		PAD	1	33.000.000
3 28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi (DLHK)			1	92.000.000
3 28 04 1.03 0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan		PAD	50	46.000.000
3 28 04 1.03 0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola		PAD	100	46.000.000
		Persentase Realisasi Penanaman pada Ekosistem Lahan Basah (UPT KPH Jebu Bembang Antan)	Kehutanan		90	-

28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi			5	-
3 28 04 1.03 0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani			5	-
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Realisasi Penanaman pada Ekosistem Lahan Basah (UPT KPH Belantu Mendanau)	K		90	-
(3 28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi			5	-
(3 28 04 1.03 0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani			5	-
		Persentase Realisasi Penanaman pada Ekosistem Lahan Basah (UPT KPH Gunung Duren)	K		90	-
3 28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi provinsi			5	-
3 28 04 1.03 0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani			5	-
3 28 05		(DLHK dan KPH)				428.147.000

3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (DLHK)	K		45	174.147.000
(3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Dokumen Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (DLHK)			1	174.147.000
3 28 05 1.01 0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		PAD	32	94.000.000
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		PAD	20	-
3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		DBH DR	116767	80.147.000
		Persentase akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPT KPH Rambat Menduyung)	K		45	30.000.000
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Dokumen Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			1	30.000.000
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		PAD	9	5.000.000
3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		PAD	1300	25.000.000
		Persentase akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPT KPH Jebu Bembang Antan)	LH		45	30.000.000
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Dokumen Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			1	30.000.000
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		PAD	3	5.000.000

3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		PAD	300	25.000.000
		Persentase akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Bubus Panca)	K		45	30.000.000
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Dokumen Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			1	30.000.000
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		PAD	6	5.000.000
3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		PAD	300	25.000.000
		Persentase akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin)	K		45	30.000.000
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Dokumen Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			1	30.000.000
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		PAD	5	5.000.000
3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		PAD	100	25.000.000
		Persentase akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Sungai Sembulan)	K		45	30.000.000
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Dokumen Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			1	30.000.000
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		PAD	2	5.000.000

3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		PAD	5000	25.000.000
		Persentase akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Muntai Palas)	K		45	30.000.000
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Dokumen Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			1	30.000.000
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		PAD	2	5.000.000
3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		PAD	107667	25.000.000
		Persentase akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Belantu Mendanau)	K		45	37.000.000
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Dokumen Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			1	37.000.000
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		PAD	14	7.000.000
3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		PAD	300	30.000.000
		Persentase akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Gunung Duren)	K		45	37.000.000
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Dokumen Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			1	37.000.000
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		PAD	20	7.000.000

3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		PAD	1800	30.000.000
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase luas DAS yang dikelola (DLHK)	K		9,13	216.500.000
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Luas Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			153005	216.500.000
3 28 06 1.01 0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan		PAD	1	19.500.000
3 28 06 1.01 0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS		PAD	6	25.000.000
3 28 06 1.01 0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		PAD	100	89.000.000
3 28 06 1.01 0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS		PAD	1	83.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam penyusunannya perlu memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbangprov tahunan untuk keterpaduan Rancangan Renja Dinas Kehutanan. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta usulan dari masyarakat.

Sebagai Dinas yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan, maka kebijakan yang diambil dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selalu diselaraskan dengan kebijakan umum Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pembantu Presiden dalam mencapai visi dan misi Nasional. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Tabel II.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD
Validasi Mitra Bappeda	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	1. Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah, Lampiran K. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Bidang 11. Persampahan, Daerah Provinsi : Penanganan sampah di TPA/TPST Regional. Dengan kewenangannya, provinsi tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana persampahan selain pengelolaan sampah regional

Verifikasi Perangkat Daerah	-	Validasi Sekretariat Dewan	Untuk diproses/ dibahas lebih lanjut	<p>1. Berdasarkan Permen LHK No 8 tahun 2021: kewenangan terhadap penerbitan, pencabutan, evaluasi dan monitoring Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sedang Pemerintah provinsi memiliki kewenangan terhadap pembinaan PBPH. Pemanfaatan hutan dapat dilaksanakan melalui kemitraan kehutanan.</p> <p>3. Dalam hal pemanfaatan kawasan hutan yang terdapat dalam PBPH HTI oleh masyarakat dapat dilaksanakan menggunakan mekanisme kemitraan dengan PBPH melalui persetujuan kementerian LHK. Kemitraan salah satu kewajiban PBPH dan memfasilitasi aspirasi warga yang ingin melaksanakan cocok tanam di wilayahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.</p>
-----------------------------	---	----------------------------	--------------------------------------	--

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru. Program dan kegiatan yang sedang berjalan yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra PD. Kegiatan alternatif atau baru yaitu yaitu program dan kegiatan PD, lintas PD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kegiatan alternatif atau baru memiliki kriteria :
 - a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - b. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra PD;
 - c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 - d. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra PD.
2. Lokasi kegiatan merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama desa/kelurahan, kecamatan.
3. Kelompok sasaran memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan. Indikator kinerja terdiri dari :

- a. indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program;
 - b. indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
4. Prakiraan maju memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Rancangan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) disusun:

- a. Mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD/Renja PD.

- b. Mengacu pada Renstra PD.

Renstra PD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra PD.

- c. Mengacu hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

- d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

- e. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja PD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3888);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 12 Seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 adalah tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

Tujuan dilaksanakan penyusunan Renja PD adalah tersusunya Renja PD yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renja Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan dan Capaian Renja PD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara PD provinsi dengan PD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misal :
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian SDGs,

- c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian SPM,
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f. Pengembangan daerah terisolir,
 - g. dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
- 1) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - 2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - 3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan.